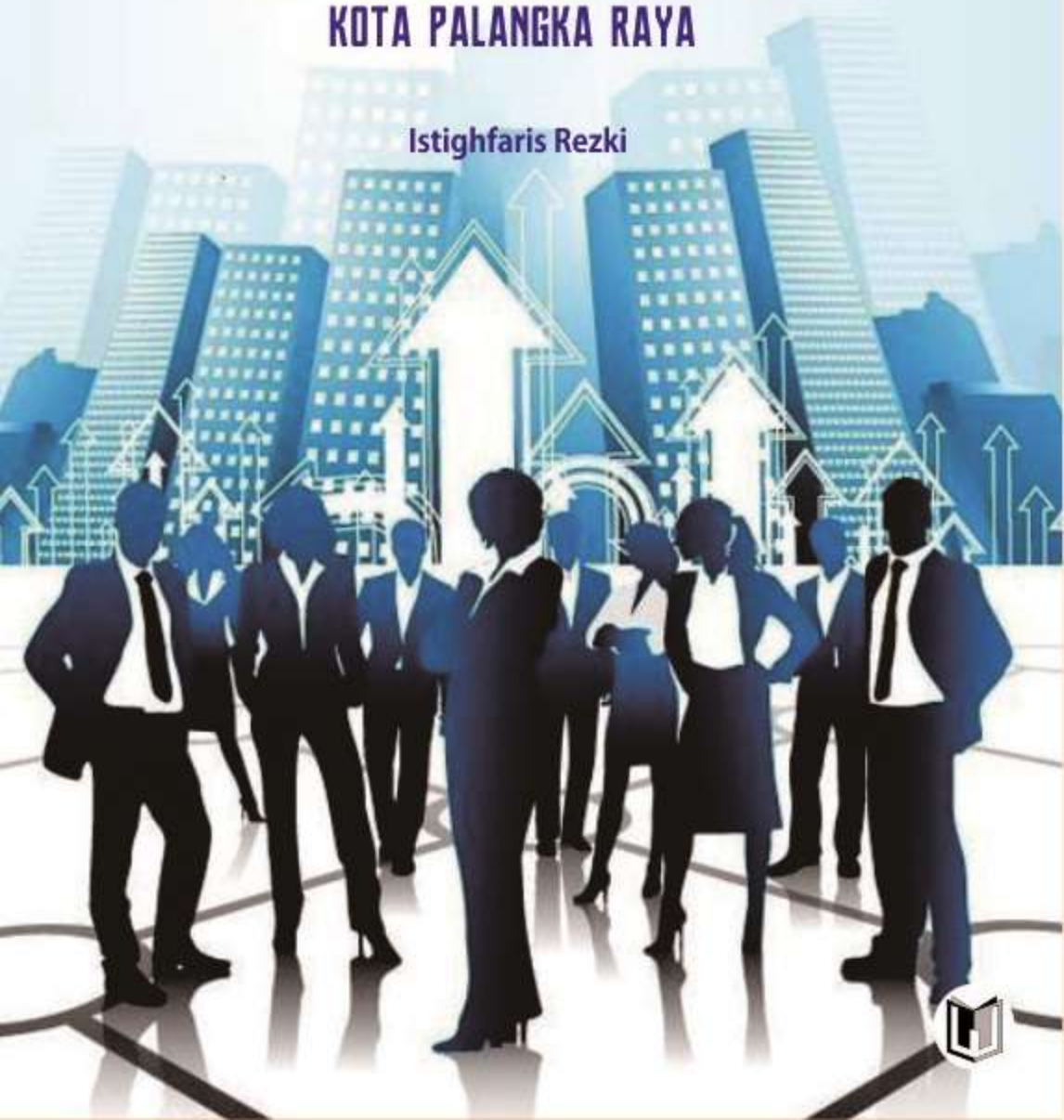


ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH INFLASI DAN TENAGA KERJA

TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
KOTA PALANGKA RAYA

Istighfaris Rezki



**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH
INFLASI DAN TENAGA KERJA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
KOTA PALANGKA RAYA**

Istighfaris Rezki



ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH INFLASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA PALANGKA RAYA

Penulis:
Istighfaris Rezki

Desain Cover:
Ridwan

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Aas Masruroh

ISBN:
978-623-5811-45-1

Cetakan Pertama:
Desember, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan judul: Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Inflasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya. Penyusunan buku ini merupakan salah satu bentuk hasil akhir dari program PKKMM kemenristekdikti. Buku ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, inflasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kota Palangka Raya. Analisis dilakukan secara statistik dengan menggunakan model persamaan regresi linier berganda, dengan menggunakan data sekunder. Atas bantuan dan dukungan yang secara langsung, maupun tidak langsung yang telah saya terima, atasnya penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang turut serta dalam penyelesaian naskah ini. Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa buku ini banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis.

Palangka Raya, November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB 2 PERTUMBUHAN EKONOMI	7
A. Hakikat Pertumbuhan Ekonomi	7
B. Proses Pertumbuhan Ekonomi	8
C. Teori Pertumbuhan Ekonomi	9
D. Pengeluaran Pemerintah	11
E. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi	13
BAB 3 INFLASI	15
A. Pengertian Inflasi	15
B. Teori Inflasi	17
C. Indikator Inflasi	17
D. Dampak Inflasi	18
E. Hubungan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi	19
F. Tenaga Kerja	19
G. Hubungan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi	20
H. Penelitian Terdahulu	21
BAB 4 KERANGKA KONSEPTUAL	23
A. Kerangka Pemikiran	23
B. Hipotesis	24
BAB 5 METODE PENELITIAN	27
A. Ruang Lingkup Penelitian	27
B. Metode Pengumpulan Data	27
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	27
D. Metode Analisis Data	28
E. Uji Asumsi Klasik	30
F. Pengujian Statistik	31
BAB 6 HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Kota Palangka Raya	33
B. Kondisi Geografis Kota Palangka Raya	33
C. Pemerintah Daerah	35

D. Kependudukan.....	37
E. Ketenagakerjaan.....	39
F. Perekonomian	40
G. Hasil Analisis Deskriptif.....	41
BAB 7 ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	45
A. Multikolinearitas.....	45
B. Uji Heteroskedastisitas	46
C. Uji Autokolerasi	46
D. Uji Normalitas	47
E. Uji Regresi Linear Berganda Dalam Bentuk Double Logaritma	47
F. Pengujian Parsial (Uji T)	48
G. Pengujian Simultan (Uji F)	49
H. Koefisien Determinasi (R^2).....	49
I. Pembahasan	50
BAB 8 KESIMPULAN DAN SARAN	53
A. Kesimpulan	53
B. Implikasi.....	53
C. Saran – Saran	54
D. Keterbatasan Penelitian	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
PROFIL PENULIS.....	59

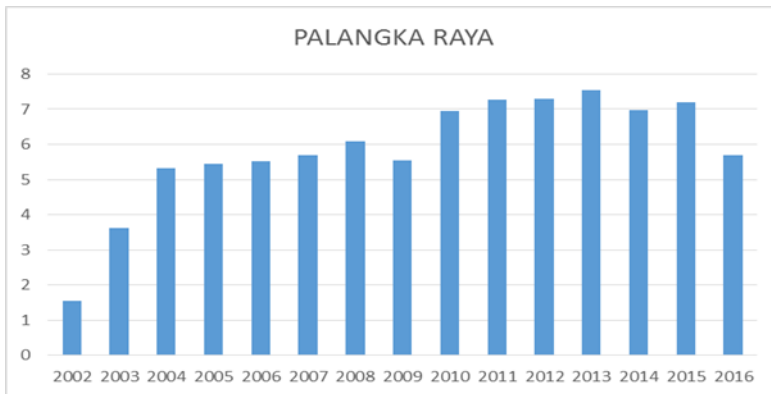


PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi mutlak diperlukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan cara mengembangkan semua bidang kegiatan yang ada di suatu negara. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Menurut Sukirno (2004) dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan yang tinggi merupakan sasaran utama bagi negara berkembang. Pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi agenda pemerintah pusat atau secara nasional, tetapi juga menjadi agenda setiap daerah dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2004). Untuk itu, kebijakan pembangunan ekonomi dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengelola potensi dan sumber daya yang ada bagi masing-masing daerah.



Sumber : BPS, Palangka Raya Dalam Angka 2002 – 2016

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Palangka Raya Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-2016. Data yang disajikan berdasarkan gambar 1.1 menggambarkan pertumbuhan riil PDRB di Kota Palangka Raya dari tahun 2002 hingga tahun 2016. Dari data tersebut dapat dilihat persentase laju pertumbuhan PDRB mengalami peningkatan dan penurunan dari berbagai tahun. Selama periode 2002 – 2016 pertumbuhan PDRB Kota Palangka Raya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,84 persen per tahun. Laju pertumbuhan PDRB terendah di Kota Palangka Raya ada pada tahun 2002 sebesar 1,56 persen, sedangkan yang tertinggi ada pada tahun 2013 sebesar 7,53 persen.

Pertumbuhan suatu perekonomian juga tidak bisa lepas dari peran pemerintah. Menurut Todaro (2006) pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan lebih besar dan lebih menentukan di dalam upaya pengelolaan perekonomian nasional/daerah. Menurut Mangkoesoebroto (2001) peranan pemerintah yang harus dijalankan adalah yang pertama adalah peranan alokasi, yaitu pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang pihak swasta tidak dapat memproduksinya. Yang kedua peranan distribusi, yaitu pemerintah melalui kebijakan fiskal merubah keadaan masyarakat sehingga sesuai dengan distribusi pendapatan yang diharapkan melalui pengenaan pajak progresif yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi yang mampu dan mendistribusikan bagi yang kurang mampu. Dan yang ketiga adalah peranan stabilisasi, yaitu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan guncangan ekonomi yang berlebihan.

Kebijakan pengeluaran pemerintah dituangkan dalam APBD. Kebijakan pengeluaran pemerintah daerah dalam APBD tercermin dari total belanja pemerintah yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan (Marganda dan Sirojuzilam, 2009).

Keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari bantuan pusat dan Pendapatan Asli Daerah merupakan bentuk dari akumulasi modal pemerintah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peranan strategis dari investasi pemerintah ini, sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat.

Keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah daerah menuntut adanya suatu kebijakan yang tepat dan pemerintah. Upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan pada kondisi dan item tertentu saja, karena secara umum upaya tersebut justru dapat meningkatkan beban yang harus ditanggung masyarakat. Salah satu sudut pandang kebijakan yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah. Kebijakan yang dituangkan dalam APBD memerlukan perhatian terutama dalam hal pendistribusian anggaran, sehingga dapat terciptanya sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah (Raharjo, 2006).

Kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja pembangunan karena variabel ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan prasarana ekonomi dan sosial seperti jalan, jembatan dan pembangunan prasarana sektor-sektor ekonomi lainnya (Raharjo, 2006).

Dalam laporan keuangan pemerintahan belanja dibagi dalam dua jenis, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait secara langsung dengan produktivitas dan tujuan organisasi (Raharjo, 2006).

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat/mengukur stabilitas perekonomian suatu negara adalah inflasi. Perubahan dalam indikator ini akan berdampak terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang sangat

ditakuti oleh semua negara. Inflasi itu sendiri yaitu kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus (Boediono, 1999).

Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.

Sejumlah teori telah dikembangkan untuk menjelaskan gejala inflasi. Menurut pandangan monetaris penyebab utama inflasi adalah kelebihan penawaran uang dibandingkan yang diminta oleh masyarakat. Sedangkan golongan non monetaris, yaitu keynesian, tidak menyangkal pendapat pandangan monetaris tetapi menambahkan bahwa tanpa ekspansi uang beredar, kelebihan permintaan agregat dapat saja terjadi jika terjadi kenaikan pengeluaran konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah atau ekspor netto.

Tenaga kerja merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2006) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karna banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki *skill* akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang bersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah (Yanatama, 2012).

Penelitian tentang sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah, kredit konsumsi, inflasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan baik secara internasional maupun nasional bahkan regional. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji studi ini dengan judul : “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Inflasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya?

2. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya?
3. Bagaimanakah pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Bertolak dari rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan atas tujuan penelitian tersebut, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik
Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan referensi perpustakaan, untuk referensi perbandingan terhadap objek penelitian yang sama khususnya tentang pengaruh pengeluaran pemerintah, inflasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Bagi Pemerintah
Sebagai bahan masukan agar lebih peduli dengan masalah pengeluaran pemerintah, inflasi dan tenaga kerja, serta diharapkan hasil penelitian ini bisa bermanfaat dalam membantu pemerintah membuat kebijakan.

BAB
2

PERTUMBUHAN EKONOMI

A. HAKIKAT PERTUMBUHAN EKONOMI

Menurut Boediono, (1999) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan output perkapita dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi di sini meliputi 3 aspek yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses (aspek ekonomis) suatu perekonomian berkembang, berubah dari waktu ke waktu.
2. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output perkapita, dalam hal ini ada 2 aspek penting yaitu output total dan jumlah penduduk. Output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk.
3. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan perspektif waktu jangka panjang. Dikatakan tumbuh bila dalam jangka panjang waktu yang cukup lama (5 tahun) mengalami kenaikan output.

Menurut Suryana, (2000) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya.

Prof. Simon Kuznets dalam kuliahnya pada peringatan Nobel mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

B. PROSES PERTUMBUHAN EKONOMI

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan nonekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia, modal, usaha, teknologi, dan sebagainya (Jhingan, 2004).

a. Faktor Ekonomi

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Beberapa faktor ekonomi tersebut di antaranya:

- 1) **Sumber Alam**
Faktor produksi kedua adalah tanah. Tanah yang dapat ditanami merupakan faktor yang paling berharga. Selain tanah, sumber daya alam yang penting antara lain minyak-minyak gas, hutan air dan bahan-bahan mineral lainnya.
- 2) **Akumulasi Modal**
Untuk pembentukan modal, diperlukan pengorbanan berupa pengurangan konsumsi, yang mungkin berlangsung selama beberapa puluh tahun. Pembentukan modal dan investasi ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kemajuan cepat di bidang ekonomi.
- 3) **Organisasi**
Organisasi bersifat melengkapi dan membantu meningkatkan produktivitasnya.
- 4) **Kemajuan Teknologi**
Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru.
- 5) **Pembagian Kerja dan Skala Produksi**
Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

b. Faktor Nonekonomi

Faktor ekonomi bersama-sama saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Oleh karena itu, faktor nonekonomi juga memiliki arti penting di dalam pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor nonekonomi di antaranya:

- 1) **Faktor Sosial**
Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur dan nilai-nilai sosial.

- 2) **Faktor Sumber Daya Manusia**
Kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi.
- 3) **Faktor Politik dan Administratif**
Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang. Administrasi yang kuat, efisien, dan tidak korup, dengan demikian amat penting bagi pertumbuhan ekonomi.

C. TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI

a. Teori-teori Pertumbuhan Ahli Ekonomi Klasik

Ahli-ahli ekonomi klasik, di dalam menganalisis masalah-masalah pembangunan, terutama ingin mengetahui tentang sebab-sebab perkembangan ekonomi dalam jangka panjang dan corak proses pertumbuhannya. Beberapa ahli ekonomi klasik yang terkemuka untuk dibahas satu demi satu (Sukirno, 2000).

1) Pandangan Adam Smith

Smith mengemukakan beberapa pandangan mengenai beberapa faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi. Pandangannya yang pertama adalah peranan sistem pasar bebas, Smith berpendapat bahwa sistem mekanisme pasar akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang efisien dan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Kedua perluasan pasar. Perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan memproduksi dengan tujuan untuk menjualnya kepada masyarakat dan mencari untung. Ketiga spesialisasi dan kemajuan teknologi. Perluasan pasar, dan perluasan ekonomi yang digalakkannya, akan memungkinkan dilakukan spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Seterusnya spesialisasi dan perluasan kegiatan ekonomi akan menggalakkan perkembangan teknologi dan produktivitas meningkat. Kenaikan produktivitas akan menaikkan pendapatan pekerja dan kenaikan ini akan memperluas pasaran.

2) Teori Schumpeter

Pada permulaan abad ini berkembang pula suatu pemikiran baru mengenai sumber dari pertumbuhan ekonomi dan sebabnya konjungtur berlaku. Schumpeter menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus menerus tetapi mengalami keadaan di mana adakalanya berkembang dan pada lain mengalami kemunduran. Konjungtur tersebut disebabkan oleh kegiatan para pengusaha (*entrepreneur*) melakukan inovasi atau pembaruan dalam kegiatan mereka menghasilkan barang dan jasa. Untuk mewujudkan inovasi yang

seperti ini investasi akan dilakukan, dan penambahan investasi ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi.

3) Pandangan Malthus dan Ricardo

Tidak semua ahli ekonomi Klasik mempunyai pendapat yang positif mengenai prospek jangka panjang pertumbuhan ekonomi. Malthus dan Ricardo berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan kembali ke tingkat subsistem. Jumlah penduduk atau tenaga kerja adalah berlebihan apabila dibandingkan dengan faktor produksi yang lain, penambahan penduduk akan menurunkan produksi per kapita dan taraf kemakmuran masyarakat. Maka, penambahan penduduk yang terus berlaku tanpa diikuti pertumbuhan sumber-sumber daya yang lain akan menyebabkan kemakmuran masyarakat mundur kembali ke tingkat subsistem.

4) Teori Harrod-Domar

Teori ini pada dasarnya melengkapi analisis Keynes mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Untuk menunjukkan hubungan di antara analisis Keynes dengan teori Harrod-Domar. Teori Keynes pada hakikatnya menerangkan bahwa perbelanjaan agregat akan menentukan tingkat kegiatan perekonomian. Analisis yang dikembangkan oleh Keynes menunjukkan bagaimana konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan akan menentukan tingkat pendapatan nasional. Analisis Harrod-Domar bahwa sebagai akibat investasi yang dilakukan tersebut pada masa berikutnya kapasitas barang-barang modal dalam perekonomian akan bertambah. Seterusnya teori Harrod-Domar dianalisis keadaan yang perlu wujud agar pada masa berikutnya barang-barang modal yang tersedia tersebut akan sepenuhnya digunakan. Sebagai jawaban tersebut menurut Harrod-Domar agar seluruh barang modal yang tersedia digunakan sepenuhnya, permintaan agregat haruslah bertambah sebanyak kenaikan kapasitas barang-barang modal yang terwujud sebagai akibat dari investasi di masa lalu.

b. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Dalam analisis Neo-Klasik, permintaan masyarakat tidak menentukan laju pertumbuhan. Dengan demikian menurut teori Neo-Klasik, sampai di mana perekonomian akan berkembang, tergantung kepada penambahan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi (Jhingan, 2004). Ahli ekonomi yang menjadi perintis mengembangkan teori tersebut di antaranya :

1) Teori J.E.Meade

Profesor J.E.Meade dari Universitas Cambridge membangun suatu model pertumbuhan ekonomi neo-klasik yang dirancang untuk menjelaskan

bagaimana bentuk paling sederhana dari sistem ekonomi klasik akan berperilaku selama proses pertumbuhan ekuilibrium.

2) Teori Solow

Menurut Solow, keseimbangan yang peka antara G_w dan G_n tersebut timbul dari asumsi pokok mengenai proporsi produksi yang dianggap tetap, suatu keadaan yang memungkinkan untuk mengganti buruh dengan modal. Jika asumsi itu dilepaskan, keseimbangan tajam antara G_w dan G_n juga lenyap bersamanya. Oleh karena itu Solow membangun model pertumbuhan jangka panjang tanpa asumsi proporsi produksi yang tetap. Dengan asumsi tersebut, Solow menunjukkan dalam modelnya bahwa dengan koefisien teknik yang bersifat variabel, rasio modal buruh akan cenderung menyesuaikan dirinya, dalam perjalanan waktu, ke arah rasio keseimbangan. Untuk mengetahui maju tidaknya suatu perekonomian diperlukan adanya suatu alat pengukur yang tepat. Alat pengukur pertumbuhan perekonomian ada beberapa macam di antaranya:

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.

b. Produk Domestik Bruto per Kapita (Pendapatan per Kapita)

Produk Domestik Bruto per Kapita merupakan jumlah PDB nasional dibagi dengan jumlah penduduk atau dapat disebut sebagai PDB rata-rata atau PDB per Kepala.

c. Pendapatan per Jam Kerja

Pendapatan per jam kerja merupakan upah atau pendapatan yang dilakukan per jam kerja. Biasanya suatu negara yang mempunyai tingkat pendapatan per jam kerja lebih tinggi daripada di negara lain, boleh dikatakan negara yang bersangkutan lebih maju daripada negara yang satunya.

Beberapa alat ukur pertumbuhan ekonomi di atas dipilih oleh suatu negara dengan keadaan ekonomi di negara tersebut. Peningkatan atau penurunan GDP ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi tersebut yaitu tenaga kerja, kapital, sumber daya alam dan lingkungan, teknologi dan faktor sosial.

D. PENGELUARAN PEMERINTAH

Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan struktur anggaran daerah, elemen-elemen yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari :

- **Belanja Aparatur**
Bagian belanja yang berupa : belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).
- **Belanja Pelayanan Publik**
Bagian belanja yang berupa : belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik)
- **Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan**
Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan ini dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu jenis belanja yaitu hibah, subsidi, bantuan sosial, dan transfer.
- **Belanja tidak terduga**
Pengeluaran yang disediakan untuk :
 - a. Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.
 - b. Utang (pinjaman) periode sebelumnya yang belum diselesaikan dan atau yang tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan.
 - c. Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan.

Belanja daerah berdasarkan pada Permendagri No 13 tahun 2006 Tentang Pengolahan Keuangan Daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Kelompok belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

E. HUBUNGAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Dumairy (1996) menyebutkan bahwa pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintah sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut berbisnis, melainkan dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi. Pemerintah juga harus memperjuangkan pemerataan melalui program perpajakan dan redistribusi pendapatan untuk kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Pemerintah harus menggunakan perangkat perpajakan, pembelanjaan dan peraturan moneter untuk menggapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi laju inflasi dan pengangguran serta memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional (Sukirno, 2000). Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Peacock dan Wiseman (1961) dalam Guritno Mangkoesobroto (2001) mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Pemerintah lebih cenderung menaikkan pajak untuk membiayai anggarannya. Di sisi lain masyarakat memiliki keengganan untuk membayar pajak, terlebih lagi jika pajak terus dinaikkan. Mempertimbangkan teori pemungutan suara dimana masyarakat memiliki batas toleransi pembayaran pajak.

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GNP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Akibat adanya keadaan tertentu yang mengharuskan pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya, maka pemerintah memanfaatkan pajak sebagai alternatif untuk peningkatan penerimaan negara. Jika tarif pajak dinaikkan maka pengeluaran investasi dan konsumsi masyarakat menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

BAB
3

INFLASI

A. PENGERTIAN INFLASI

Angka inflasi sebagai salah satu indikator stabilitas ekonomi selalu menjadi pusat perhatian orang. Paling tidak turunnya angka inflasi mencerminkan gejala ekonomi di suatu negara. Tingkat inflasi yang tinggi jelas merupakan hal yang merugikan bagi perekonomian negara. Pengalaman menunjukkan bahwa keadaan perekonomian yang tidak menguntungkan telah memacu tingkat inflasi yang tinggi dan pada gilirannya akan menjadi kerugian bagi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah.

Menurut Sukirno (2004) Inflasi tarikan permintaan, yaitu Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Sedangkan Inflasi desakan biaya, yaitu Inflasi yang berlaku pada masa perekonomian berkembang dengan pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya. Langkah ini membuat biaya produksi meningkat, yang akhirnya menyebabkan kenaikan harga berbagai barang.

Definisi lain inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain.

Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus (Boediono, 1999). Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain.

Inflasi adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh tidak adanya keseimbangan antara permintaan akan barang-barang dan persediaannya, yaitu permintaan melebihi persediaan dan semakin besar perbedaan itu semakin besar bahaya yang ditimbulkan oleh inflasi bagi kesehatan ekonomi (Soesastro, 2005).

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi permintaan *demand-pull inflation* dan *cost-push inflation*. *Cost-push inflation* disebabkan oleh turunnya produksi karena naiknya biaya produksi (naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan, nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat, dan sebagainya). *Demand-pull inflation* dapat disebabkan oleh adanya kenaikan permintaan agregat (AD) yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran produksi agregat.

Pemahaman awal tentang inflasi lebih menekankan nilai uang. Keseluruhan tingkat harga dalam perekonomian dapat dipandang dari dua sisi, yaitu tingkat harga sebagai harga sejumlah barang dan jasa. Ketika tingkat harga naik, maka orang harus membayar lebih untuk membeli barang dan jasa. Sebagai alternatif, kita memandang tingkat harga sebagai ukuran nilai uang. Kenaikan tingkat harga berarti nilai uang menjadi lebih rendah. Apabila hal ini diungkapkan secara matematis, maka anggaplah P sebagai tingkat harga yang diukur, misal oleh indeks harga konsumen atau deflator PDB. Maka, P mengukur jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sejumlah barang dan jasa. Jika dibalik, maka jumlah barang dan jasa dapat diperoleh dengan \$ 1 adalah $1/P$. Dengan kata lain, bila P merupakan harga barang dan jasa yang diukur dalam nilai uang, maka $1/P$ merupakan nilai uang yang diukur dalam barang dan jasa. Ini berarti ketika tingkat harga keseluruhan naik, maka nilai uang jatuh (Mankiw, 2003).

Dari definisi tersebut, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi (Pratama, 2008), yaitu sebagai berikut:

- a. Kenaikan harga. Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya.
- b. Bersifat umum. Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik.

- c. Berlangsung terus menerus. Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan.

B. TEORI INFLASI

Secara garis besar ada tiga kelompok teori mengenai inflasi, masing-masing teori ini menyatakan aspek-aspek tertentu dari proses inflasi dan masing-masing bukan teori inflasi yang lengkap yang mencakup semua aspek penting dari proses kenaikan harga. Teori tersebut di antaranya yaitu:

- a. Teori Kuantitas

Menurut teori ini inflasi terjadi karena adanya penambahan volume uang yang beredar (apakah berupa penambahan uang giral atau uang kartal) tanpa diimbangi oleh penambahan arus barang dan jasa serta harapan masyarakat mengenai kenaikan harga dimasa akan datang (Boediono, 1999).

- b. Teori Keynes

Menurut teori ini adalah inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi, menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (Boediono, 1999).

- c. Teori Strukturalis

Teori inflasi jangka panjang karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi. Karena struktur pertumbuhan produksi barang-barang ini terlalu lambat dibanding dengan pertumbuhan kebutuhannya, sehingga menaikkan harga bahan makanan dan kelangkaan devisa. Akibat selanjutnya, adalah kenaikan harga-harga lain, sehingga terjadi inflasi.

C. INDIKATOR INFLASI

Ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu (Prathama, 2008). Di antaranya yaitu:

- a. Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index*)

Indeks Harga Konsumen atau disingkat IHK adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen

dalam satu periode tertentu. Dalam indeks harga konsumen, setiap jenis barang ditentukan suatu timbangan atau bobot tetap yang proporsional terhadap kepentingan relatif dalam anggaran pengeluaran konsumen.

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (*Wholesale Price Index*)

Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu IHPB sering juga disebut sebagai Indeks Harga Produsen (*Producer Price Index*). IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.

c. Indeks Harga Implicit (GNP Deflator)

Indeks Harga Implicit (GNP Deflator) adalah suatu indeks yang merupakan perbandingan rasio antara GNP nominal dan GNP riil dikalikan dengan 100. GNP riil adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan di dalam perekonomian, yang diperoleh ketika output dinilai dengan menggunakan harga tahun dasar (*base year*).

d. Alternative dari Indeks Harga Implicit

Mungkin saja terjadi, pada saat ingin menghitung inflasi dengan menggunakan IHI tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data IHI. Hal ini bisa diatasi. Sebab prinsip dasar penghitungan inflasi berdasarkan deflator PDB (GDP deflator) adalah membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan riil. Selisih keduanya merupakan tingkat inflasi.

D. DAMPAK INFLASI

Inflasi yang terjadi di dalam suatu perekonomian memiliki beberapa dampak atau akibat yaitu sebagai berikut:

- a. Inflasi dapat mendorong terjadinya redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Hal ini akan memengaruhi kesejahteraan ekonomi dari anggota masyarakat, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akan menyebabkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan riil orang lainnya jatuh.
- b. Inflasi dapat menyebabkan penurunan di dalam efisiensi ekonomi (*economic efficiency*).
- c. Inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan di dalam output dan kesempatan kerja (*employment*).
- d. Inflasi dapat menciptakan suatu lingkungan yang tidak stabil (*unstable environment*) bagi keputusan ekonomi.
- e. Inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan. Pada masa inflasi, nilai harta tetap seperti tanah atau bangunan mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada pendapatan, sedangkan masyarakat berpendapatan

rendah yang biasanya tidak memiliki harta tetap tersebut akan mengalami kemerosotan nilai pendapatan riilnya.

E. HUBUNGAN INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Pada prinsipnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian. Terutama jika terjadi inflasi ringan di bawah sepuluh persen. Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena inflasi mampu memberi semangat pada pengusaha, untuk lebih meningkatkan produksinya. Pengusaha bersemangat memperluas produksinya, karena dengan kenaikan harga yang terjadi para pengusaha mendapat lebih banyak keuntungan. Selain itu, peningkatan produksi memberi dampak positif lain, yaitu tersedianya lapangan kerja baru. Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi sepuluh persen.

Dengan adanya inflasi maka kenaikan tingkat inflasi menunjukkan adanya suatu pertumbuhan perekonomian, namun dalam jangka waktu panjang maka tingkat inflasi yang tinggi sangat memberikan dampak yang sangat buruk. Dengan tingginya tingkat inflasi hal ini yang menyebabkan barang domestik relatif lebih mahal bila dibandingkan dengan harga barang import.

Jika kita melihat bahwa pada prinsipnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian. Terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu inflasi di bawah 10% dengan adanya inflasi ringan ini dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Ini yang membuat semangat para pengusaha untuk lebih meningkatkan produksinya dengan membuka lapangan kerja baru.

F. TENAGA KERJA

Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (15 - 64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2003).

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun atau lebih yang bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang melakukan kegiatan lain, seperti sekolah maupun mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan (Simanjuntak, 1985).

Lewis dalam Mulyadi (2003) mengemukakan teorinya mengenai ketenagakerjaan. yaitu kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja disektor lain.

Selanjutnya Lewis mengemukakan bahwa ada dua sektor didalam perekonomian negara sedang berkembang yaitu sektor modern dan sektor tradisional. Sektor tradisional tidak hanya berupa sektor pertanian di pedesaan, melainkan juga termasuk sektor informal di perkotaan (pedagang kaki lima, pengecer, pedagang angkringan).

Sektor informal mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada selama berlangsungnya proses industrialisasi, sehingga disebut katub pengaman ketenagakerjaan. Dengan terserapnya kelebihan tenaga kerja disektor industri (sektor modern) oleh sektor informal. maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara pedesaan dan perkotaan. sehingga kelebihan penawaran pekerja tidak menimbulkan masalah pada pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi perpindahan tenaga kerja dan sektor tradisional ke sektor modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak pernah menjadi terlalu banyak.

G. HUBUNGAN TENAGA KERJA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka panjang bersamaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi sumber daya alam dan kapasitas produksi. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar dapat berarti menambah jumlah tenaga produktif. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja diharapkan akan meningkatkan Produksi, yang berarti akan meningkatkan pula PDRB.

Menurut Nicholson W (1994) bahwa suatu fungsi produksi pada suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah $q = f(K, L)$ di mana K merupakan modal dan L adalah tenaga kerja memperlihatkan jumlah maksimum sebuah barang / jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L , maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi. Tambahan keluaran yang diproduksi inilah yang disebut dengan produk fisik marginal (*marginal physical product*). Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga kerja ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain dipertahankan konstan maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan output, namun pada suatu tingkat tertentu akan

memperlihatkan penurunan output serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimum setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi keluaran.

Menurut Todaro (2006), pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meskipun demikian, hal tersebut masih dipertanyakan, apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pertumbuhan ekonominya.

Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tenaga kerja dan akumulasi modal, dan tersedianya input dan faktor produksi penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Jumlah tenaga kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dan lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia, maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksi di suatu daerah.

H. PENELITIAN TERDAHULU

Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, para peneliti telah melakukan berbagai penelitian tentang analisis pengaruh pengeluaran pemerintah, inflasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya penelitian tersebut, sehingga akan sangat membantu dalam mencermati masalah yang akan diteliti dengan pendekatan spesifik dan dapat dijadikan rujukan yang relevan dan menjadi referensi untuk penelitian ini. Selain itu juga dapat memberikan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

Secara ringkas dalam tabel 2.1 disajikan beberapa ringkasan hasil penelitian-penelitian sejenis yang relevan dan menjadi referensi dalam penelitian ini. Sebagai variabel independen sedangkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan rentan waktu 2002-2016 (15 tahun).

BAB
4

KERANGKA KONSEPTUAL

A. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang tersusun adalah bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu pengeluaran pemerintah, inflasi, dan tenaga kerja. Variabel tersebut termasuk variabel independen dan bersama-sama dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen akan diukur dengan alat analisis regresi untuk memperoleh tingkat signifikansinya.

Pengeluaran pemerintah di dalam APBD terdiri dari Pengeluaran Belanja Aparatur / Belanja Rutin yang antara lain belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja pegawai dinas dan belanja lainnya. Sedangkan Belanja Pengeluaran Publik / Belanja Pembangunan antara lain belanja bidang ekonomi, belanja bidang sosial, belanja bidang umum dan belanja lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat berpengaruh oleh faktor yang memberi andil dalam pertumbuhan produksi dari masing-masing sektor. Perkembangan PDRB baik berdasarkan atas dasar konstan maupun atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun mencerminkan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini variabel pengeluaran pemerintah diwakili oleh data total belanja langsung dan belanja tidak langsung di Kota Palangka Raya

Dengan adanya inflasi maka kenaikan tingkat inflasi menunjukkan adanya suatu pertumbuhan perekonomian, namun dalam jangka waktu panjang maka tingkat inflasi yang tinggi sangat memberikan dampak yang sangat buruk. Dengan tingginya tingkat inflasi hal ini yang menyebabkan barang domestik relatif lebih mahal bila dibandingkan dengan harga barang import. Dalam penelitian ini variabel inflasi diwakili oleh data laju inflasi di Kota Palangka Raya

Pertumbuhan tenaga kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jadi, meningkatnya tenaga kerja akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas dan akan memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini variabel tenaga kerja diwakili oleh data total jumlah orang yang bekerja dan mencari kerja di Kota Palangka Raya.

B. HIPOTESIS

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional (Sukirno, 2000). Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Pemahaman awal tentang inflasi lebih menekankan nilai uang. Keseluruhan tingkat harga dalam perekonomian dapat dipandang dari dua sisi, yaitu tingkat harga sebagai harga sejumlah barang dan jasa. Ketika tingkat harga naik, maka orang harus membayar lebih untuk membeli barang dan jasa. Sebagai alternatif, kita memandang tingkat harga sebagai ukuran nilai uang. Kenaikan tingkat harga berarti nilai uang menjadi lebih rendah. Inflasi adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh tidak adanya keseimbangan antara permintaan akan barang-barang dan persediaannya, yaitu permintaan melebihi persediaan dan semakin besar perbedaan itu semakin besar bahaya yang ditimbulkan oleh inflasi bagi kesehatan ekonomi (Soesastro, 2005).

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka panjang bersamaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi sumber daya alam dan kapasitas produksi. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar dapat berarti menambah jumlah tenaga produktif. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja diharapkan akan meningkatkan Produksi, yang berarti akan meningkatkan pula PDRB. Menurut Todaro (2006), pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meskipun demikian, hal tersebut masih dipertanyakan, apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pertumbuhan ekonominya.

Berdasarkan teori tersebut sehingga dapat dirumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis Pertama adalah Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya.
2. Hipotesis Kedua adalah Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya.
3. Hipotesis Ketiga adalah Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya.



METODE PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kuantitatif, sesuai dengan namanya, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Arikunto, 2002). Lokasi penelitian ini ada di Kota Palangka Raya dengan tahun penelitian 2002 - 2016. Penelitian ini menggunakan variabel yang terdiri dari variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) dan variabel independen (pengeluaran pemerintah, inflasi, dan tenaga kerja).

B. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini data dihimpun menggunakan data sekunder di mana data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain (sudah tersedia) yaitu data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang meliputi :

1. Pengeluaran pemerintah
2. Inflasi
3. Tenaga kerja
4. Pertumbuhan ekonomi

C. VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL

1. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi

variabel lain. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (terikat), dan empat variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya. Sementara untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah, Inflasi, dan Tenaga Kerja.

2. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman terhadap variabel dependen maupun independen dalam penelitian ini, maka diperlukan definisi operasional, yakni:

- a. **Pengeluaran Pemerintah**
Pengeluaran pemerintah adalah realisasi total belanja daerah di Pemerintah Kota Palangka Raya, dinyatakan dalam satuan rupiah.
- b. **Inflasi**
Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus yaitu berdasarkan perhitungan dari tahun 2002- 2016 yang dinyatakan dalam bentuk persentase.
- c. **Tenaga Kerja**
Tenaga Kerja adalah orang yang digolongkan ke dalam angkatan kerja yang bekerja, yaitu penduduk yang berusia 15 hingga 65 tahun. Dengan kata lain penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja yang bekerja merupakan penduduk yang terlibat aktif dalam perekonomian. Satuan dari variabel tenaga kerja ini adalah orang atau jiwa
- d. **Pertumbuhan Ekonomi**
Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi diukur dari selisih antara Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada saat ini dengan PDRB sebelumnya dibagi dengan PDRB saat ini. Dalam penelitian ini PDRB dalam bentuk rupiah.

D. METODE ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah regresi di mana variabel terikat (Y) dihubungkan atau dijelaskan oleh lebih dari satu variabel, bisa dua, tiga dan seterusnya variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3 X_n) namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linier.

Adapun perumusan analisis ini yaitu menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 \text{Log}X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

X_1 = Pengeluaran Pemerintah (Rupiah)

X_2 = Inflasi (Persen)

X_3 = Tenaga Kerja (Jiwa)

ε = Kesalahan Pengganggu

Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, ada beberapa bentuk uji yang digunakan, yaitu uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik antara lain uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan uji hipotesis antara lain uji t (parsial), uji F (simultan), dan uji koefisien determinasi (R^2)

Model Ordinary Least Square (OLS) diperkenalkan pertama kali oleh seorang ahli matematika dari Jerman, yaitu Carl Friedrich Gauss, metode OLS adalah metode untuk mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan dari setiap observasi terhadap garis tersebut (Kuncoro, 2003).

Menurut Gujarati (1995), setiap estimator OLS harus memenuhi kriteria BLUE, yaitu :

1. *Best* adalah yang terbaik
2. Linier adalah kombinasi linier dari sampel jika ukuran sampel ditambah maka hasil nilai estimasi akan mendekati parameter populasi yang sebenarnya.
3. *Unbiased* adalah rata-rata atau nilai harapan atau estimasi sesuai dengan nilai yang sebenarnya.
4. *Efficient estimator* adalah memiliki varians yang minimum di antara pemerkiraan lain yang tidak bias.

Untuk memenuhi analisis regresi tersebut perlu diuji asumsi klasik dan uji hipotesis teori sehingga hasil estimasi tersebut dapat terhindar dari masalah regresi lancang.

E. UJI ASUMSI KLASIK

Suatu model dikatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat tidak bias linier terbaik suatu penaksir. Di samping itu suatu model dikatakan cukup baik dan dapat dipakai untuk memprediksi apabila sudah lolos dari serangkaian uji asumsi klasik yang melandasinya. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini yaitu terdiri dari :

a. Uji Normalitas

Digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan independen berdistribusi normal atau tidak. Menggunakan Jarque-Bera test atau J-B test, membandingkan JB hitung dengan X^2 tabel. Jika JB hitung < nilai X^2 tabel maka data berdistribusi normal atau nilai Probability < derajat kepercayaan yang ditentukan (Insukindro, 2003).

b. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat interkorelasi yang sempurna di antara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi. Uji multikolineritas menggunakan nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregresi terhadap variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/\text{tolerance}$) dan menunjukkan adanya kolonieritas yang tinggi. Lebih ditegaskan oleh Ghozali bila korelasi antara dua variabel bebas melebihi 90% maka VIF-nya di atas 10 maka dapat dikatakan bahwa model tersebut terkena multikolineritas (Ghozali, 2001).

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara variabel itu sendiri pada pengamatan yang berbeda. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji Breusch-Godfrey *Serial Correlation Lagrange Multiplier Test* (uji LM). Uji ini sangat berguna untuk mengidentifikasi masalah autokorelasi tidak hanya pada derajat pertama tetapi bisa juga digunakan pada tingkat derajat. Dikatakan terjadi auto korelasi jika nilai X^2 ($\text{Obs} \times R\text{-Squared}$) hitung > X^2 tabel atau nilai Probability < derajat kepercayaan yang ditentukan (Insukindro, 2003).

d. Uji heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah variansi data yang digunakan untuk membuat model menjadi tidak konstan. Pengujian terhadap ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dalam suatu model empiris yang sedang diamati juga

merupakan langkah penting sehingga dapat terhindar dari masalah regresi lancung. Metode untuk dapat mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dalam model empiris dengan menggunakan uji White (Insukindro, 2003). Untuk menguji heteroskedastisitas, program olah data Eviews menyediakan metode pengujian dengan menggunakan uji White, dimana dalam program olah data Eviews dibedakan menjadi dua bentuk uji White Heteroskedasticity (no cross term) dan White Heteroskedasticity (cross term). Dikatakan terdapat masalah heteroskedastisitas dari hasil estimasi model OLS, jika X^2 (Obs* R-Squared) untuk uji White baik cross term ataupun no cross term > X^2 tabel atau nilai Probability < derajat kepercayaan yang ditentukan (Insukindro, 2003).

F. PENGUJIAN STATISTIK

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara individu dan bersama-sama mempengaruhi signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini meliputi Uji t, Uji F dan koefisien determinasi (R^2).

a. Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Untuk melakukan uji t dengan cara Quick Look, yaitu : melihat nilai Probability dan derajat kepercayaan yang ditentukan dalam penelitian atau melihat nilai t tabel dengan t hitungnya. Jika nilai Probability < derajat kepercayaan yang ditentukan dan jika nilai t hitung lebih tinggi dari t tabel maka suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependennya (Kuncoro, 2003).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Untuk melakukan uji F dengan cara Quick Look, yaitu : melihat nilai Probability dan derajat kepercayaan yang ditentukan dalam penelitian atau melihat nilai t tabel dengan F hitungnya. Jika nilai Probability < derajat kepercayaan yang ditentukan dan jika nilai F hitung lebih tinggi dari t tabel maka suatu variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya (Kuncoro, 2003).

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel

dependen sangat terbatas dan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya (Kuncoro, 2003).



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

Kota Palangka Raya sebagai salah satu daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai suatu organisasi telah menyusun dan menetapkan kembali beberapa lembaga/instansi otonom berdasarkan peraturan daerah, yang berfungsi untuk melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

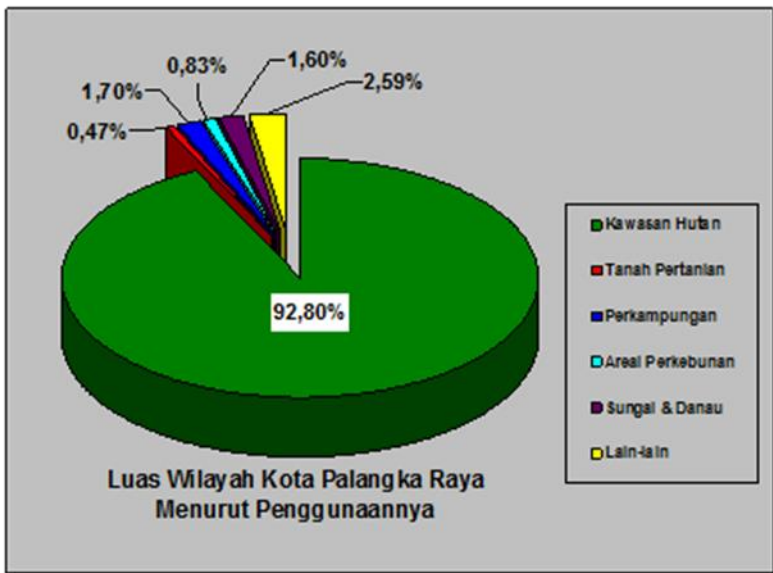
B. KONDISI GEOGRAFIS KOTA PALANGKA RAYA

Kota Palangka Raya yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, secara geografis terletak pada 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan, dengan batas administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gunung Mas.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gunung Mas.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Katingan.

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah sebesar 2.853,52 km² dibagi dalam 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.

Dari luas wilayah Kota Palangka Raya tersebut, sebagian besar yaitu 2.485,75 Km² (92,80%) merupakan kawasan hutan, kemudian tanah pertanian seluas 12,65 Km² (0,47%), perkampungan seluas 45,54 Km² (1,70%), perkebunan seluas 22,30 Km² (0,83%), sungai dan danau seluas 42,86 Km² (1,60%) dan lain-lainnya seluas 69,41 Km² (2,59%). (Selayang Pandang Kota Palangka Raya Tahun 2014).



Luas Wilayah Kota Palangka Raya

Sebagian besar wilayah Kota Palangka Raya merupakan dataran rendah, dengan ketinggiannya berkisar 8 – 16 meter dari permukaan laut, kecuali di sebagian wilayah Kecamatan Bukit Batu dan Rakumpit merupakan daerah perbukitan berkisar 27 – 43 meter dari permukaan laut. Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Kota Palangka Raya mendapat penyinaran sinar matahari rata-rata lebih dari 50% sepanjang tahun, kelembaban udara berkisar antara 79% – 86,7%. Suhu udara relatif panas yaitu pada siang hari mencapai 35,40°C dan malam hari 21,00°C, sedangkan curah hujan (Januari – Desember 2016) berkisar 214,1 mm – 443,9 mm, dengan jumlah hari hujan rata-rata per bulan 16 hari (2016).

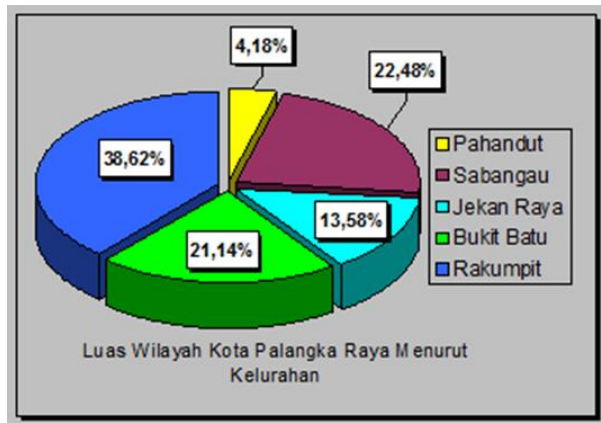
Luas tanah di Kota Palangka Raya menurut jenisnya, yaitu: podsol 10.078 ha, regosol 89.955 ha, organosol 141.088 ha, aluvial 24.635 ha, litosol 180 ha, podsolik kuning 179 ha, sungai dan danau 4.286 ha (Palangka Raya Dalam Angka, 2014)

C. PEMERINTAH DAERAH

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah sebesar 2.853,52 km² dibagi dalam 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Pahandut 119,41 Km² (4,18%), Kecamatan Sabangau 641,47 Km² (22,48%), Kecamatan Jekan Raya 387,53 Km² (13,58%), Kecamatan Bukit Batu 603,16 Km² (21,14%) dan Kecamatan Rakumpit 1.101,95 Km² (38,62%). (Palangka Raya Dalam Angka, 2017)

Kota Palangka Raya dengan motto “Isen Mulang”, yang berarti pantang menyerah, pantang mundur, dan maju terus, dengan visi: “Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan, jasa dan wisata yang berkualitas, tertata, dan berwawasan lingkungan. Menuju masyarakat yang sejahtera sesuai filosofi budaya betang”.

Secara administratif, Kota Palangka Raya terdiri dari 5 wilayah kecamatan dan 30 kelurahan, 157 RW dan 625 RT. Kecamatan Pahandut dengan luas 119,41km² (4,18% dari luas wilayah kota), kemudian Kecamatan Sabangau seluas 641,47 km² (22,48%), Kecamatan Jekan Raya seluas 387,53 km² (13,58%), Kecamatan Bukit Batu seluas 603,16 km² (21,14%), dan Kecamatan Rakumpit, merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas yaitu 1.101,95 km² atau 38,62% dari luas wilayah kota (Palangka Raya Dalam Angka, 2017)



Luas Wilayah Kota Palangka Raya (Tingkat Kelurahan)

Dilihat dari jumlah kelurahan, RT/RW-nya, Kecamatan Pahandut memiliki 6 kelurahan, 61 RW dan 235 RT; Kecamatan Sabangau memiliki 6 kelurahan, 14 RW dan 76 RT; Kecamatan Jekan Raya memiliki 4 kelurahan, 56 RW dan 292 RT; Kecamatan Bukit Batu memiliki 7 kelurahan, 8 RW dan 55 RT; dan Kecamatan Rakumpit memiliki 7 kelurahan, 8 RW dan 19 RT. Jumlah kecamatan, luas wilayah, jumlah kelurahan, jumlah RW dan RT di Kota Palangka Raya tahun 2016, seperti terlihat.

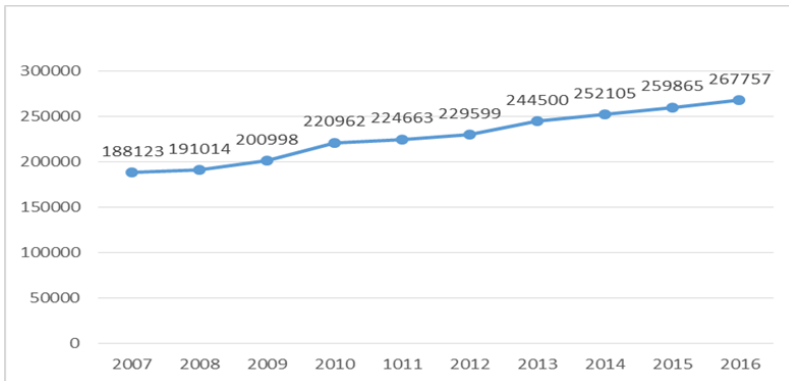
**Jumlah Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan, Rukun Warga (RW)
dan Rukun Tetangga (RT) Kota Palangka Raya, Tahun 2016**

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Kelurahan	RW	RT
1	Pahandut	119,41 (4,18%)	1. Pahandut 2. Panarung 3. Langkai 4. Tumbang Rungan 5. Tanjung Pinang 6. Pahandut Seberang	26 14 17 1 4 2	96 49 68 2 11 9
Kec. Pahandut			6	61	235
2	Sabangau	641,47 (22,48%)	1. Kereng Bangkirai 2. Sabaru 3. Kalampangan 4. Kameloh Baru 5. Bereng Bengkel 6. Danau Tundai	3 3 5 1 1 1	19 14 30 5 6 2
Kec. Sabangau			6	14	76
3	Jekan Raya	387,53 (13,56%)	1. Menteng 2. Palangka 3. Bukit Tunggal 4. Petuk Katimpun	13 25 16 2	69 124 92 7
Kec. Jekan Raya			4	56	292
4	Bukit Batu	603,16 (21,14%)	1. Marang 2. Tumbang Tahai 3. Banturung 4. Tangkiling 5. Sei Gohong 6. Kanarakan 7. Habaring Hurung	2 1 1 1 1 1 1	5 7 11 14 17 4 7
Kec. Bukit Batu			7	8	55
5	Rakumpit	1.101,95 (38,62%)	1. Petuk Bukit 2. Pager 3. Panjehang 4. Gaung Baru 5. Petuk Barunai 6. Mungku Baru 7. Bukit Sua	2 1 1 1 1 1 1	5 3 2 1 3 3 2
Kec. Rakumpit			7	8	19
Kota Palangka Raya		2.853,52	30	147	677

Sumber : BPS, Palangka Raya Dalam Angka 2017

D. KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2016 sebanyak 267.757 jiwa, dari jumlah tersebut sebanyak 137.057 jiwa laki-laki dan 130.700 jiwa perempuan, dengan sex ratio sebesar 105. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2007-2016) laju pertumbuhan penduduk Kota Palangka Raya cenderung meningkat dengan angka laju pertumbuhan rata-rata 3,04% per tahun. (Palangka Raya Dalam Angka 2016, 2017).



Perkembangan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2007 – 2016

Selanjutnya apabila luas wilayah dibanding dengan jumlah penduduknya, maka diperoleh tingkat kepadatan penduduk Kota Palangka Raya yang masih tergolong relatif jarang, yaitu hanya rata-rata sekitar 94 jiwa/km². Namun apabila dilihat dari sebaran penduduknya maka sebarannya sangat tidak merata, sebagian besar penduduk terkonsentrasi di wilayah perkotaan, seperti di Kecamatan Pahandut rata-rata 785 jiwa/km² dan di Kecamatan Jekan Raya rata-rata 359 jiwa/km², sedangkan di Kecamatan Rakumpit rata-rata 3 jiwa/km². (Palangka Raya Dalam Angka 2017). Sebaran penduduk yang tidak merata dan cenderung terpusat dalam suatu wilayah di perkotaan ini tentu akan memunculkan persoalan tersendiri bagi pemerintah daerah, seperti : masalah penataan permukiman, pengelolaan sampah, lokasi tempat berusaha, munculnya kantong-kantong kemiskinan, dan masalah sosial lainnya. Keadaan jumlah dan kepadatan penduduk di Kota Palangka Raya tahun 2016 menurut kecamatan, seperti terlihat berikut

**Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Palangka Raya Menurut
Kecamatan Tahun 2016**

N o	Kecamatan	Luas (Km ²)	Laki- laki (Jiwa)	Perempua n (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/km ²)	Sex ratio
1	Pahandut	119,41	47.947	45.947	93.894	786	104
2	Sabangau	641,47	9.026	8.372	17.398	27	108
3	Jekan	387,53	71.131	68.181	139.312	359	104
4	Bukit Batu	603,16	7.151	6.598	13.749	23	108
5	Rakumpit	1.101,95	1.801	1.602	3.404	3	112
Jumlah		2.853,52	137.057	130.700	267.757	94	105

Sumber : BPS, Palangka Raya Dalam Angka 2017

Komposisi penduduk Kota Palangka Raya tahun 2016 dilihat dari struktur umurnya, kelompok umur tidak produktif (0-14 tahun) sebanyak 67.796 jiwa, kelompok umur produktif (15 – 64 tahun) sebanyak 192.823 jiwa, dan kelompok umur tidak produktif ($\geq$ 65 tahun) sebanyak 7.138 jiwa. Dari data struktur umur penduduk tersebut menunjukkan bahwa porsi penduduk yang relatif besar termasuk dalam kelompok penduduk usia produktif secara ekonomis. Data struktur umur tersebut juga dapat menunjukkan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk di Kota Palangka Raya sebesar 39. Keadaan ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 30 orang penduduk yang tidak produktif. (Palangka Raya Dalam Angka, 2017).

Selanjutnya angka garis kemiskinan di Kota Palangka Raya tahun 2016, yaitu sebesar Rp.324.082,-/bulan, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 9.960 orang, dengan tingkat persentase pendudukan miskin sebesar 3,75%. (Palangka Raya Dalam Angka, 2017).

Persentase penduduk miskin di Kota Palangka Raya, sejak tahun 2013 hingga tahun 2016, cenderung menurun dari 3,94% (2013), turun menjadi 3,81% (2014), meskipun mengalami sedikit kenaikan menjadi 3,91% (2015), akan tetapi ditahun berikutnya kembali menurun menjadi 3,75% (2016). Tabel 5.3. berikut ini memperlihatkan garis kemiskinan, persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin di Kota Palangka Raya tahun 2013-2016.

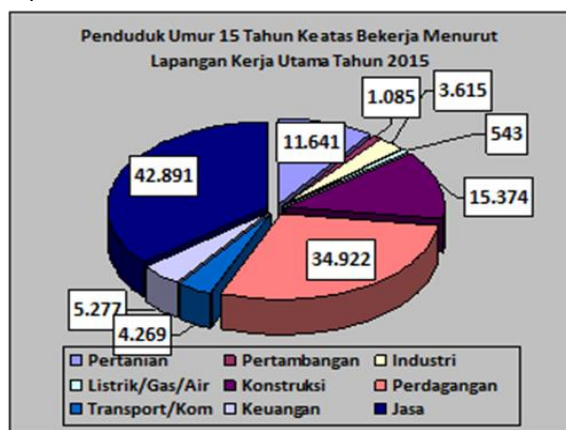
Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2013-2016

No	Tahun	Garis Kemiskinan/ Rupiah/Bulan	Persentase Penduduk Miskin	Penduduk Miskin (000)
1	2013	281.323	3,94	9,70
2	2014	299.328	3,81	9,68
3	2015	307.796	3,91	10,25
4.	2016	324.082	3,75	9.96

Sumber : BPS, Palangka Raya Dalam Angka 2017

E. KETENAGAKERJAAN

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya berusia 15 tahun ke atas yang bekerja pada berbagai sektor atau lapangan usaha utama tahun 2015 yaitu sebanyak 119.589 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar penduduk bekerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa, yaitu masing-masing sebanyak 34.922 orang, dan 42.891 orang. Selanjutnya diikuti oleh sektor konstruksi sebanyak 15.374 orang, sektor pertanian sebanyak 11.614 orang, sektor keuangan, perbankan dan jasa perusahaan sebanyak 5.277 orang, sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi sebanyak 4.269 orang, sektor industri pengolahan sebanyak 3.615 orang, sektor pertambangan dan penggalian sebanyak 1.085 orang, dan yang terkecil sektor listrik, gas dan air bersih, yaitu sebanyak 543 orang. (Palangka Raya Dalam Angka, 2017).



Ketenagakerjaan

Selanjutnya penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kota Palangka Raya (2015), maka sebagian besar masih tergolong berpendidikan yang relatif rendah. Keadaan ini ditunjukkan oleh sebanyak 39.375 orang penduduk yang bekerja hanya berpendidikan tidak/belum tamat SD, tamat SD dan tamat SLTP, atau masih dalam tingkat pendidikan dasar. Kemudian penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 46.743 orang, sedangkan penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan Diploma/Sarjana sebanyak 33.471. (Palangka Raya Dalam Angka, 2017).

F. PEREKONOMIAN

Keadaan perekonomian Kota Palangka Raya dalam kurun waktu tahun 2011-2016. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya sebesar 7,27%, meningkat menjadi 7,29% (2012), dan terus meningkat menjadi 7,53% (2013). Namun pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya mengalami penurunan menjadi 6,96%. Tahun 2015 kembali naik menjadi 7,19%. Dan pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 6,92%.



Perekonomian

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya masih lebih tinggi jika dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada periode tahun yang sama. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah sebesar 7,01%, turun menjadi 6,87% (2012), selanjutnya meningkat menjadi 7,37% (2013), kemudian menurun kembali menjadi 6,21% (2014) tahun (2015) kembali meningkat menjadi 7,01% dan tahun (2016) turun menjadi 6,36%. (Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun 2017).

Pada tahun 2014 PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha, dan menggunakan tahun dasar 2010. Nilai PDRB Kota Palangka Raya atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 mencapai 12.792.940,0 juta rupiah. Sedangkan atas dasar harga konstan mencapai 8.859.548,2 juta rupiah. (Palangka Raya Dalam Angka, 2017).

Selanjutnya apabila dilihat dari besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, maka struktur perekonomian Kota Palangka Raya di dominasi oleh 3 (tiga) sektor utama yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 21,80%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,36%, dan sector Konstruksi sebesar 11,38%.

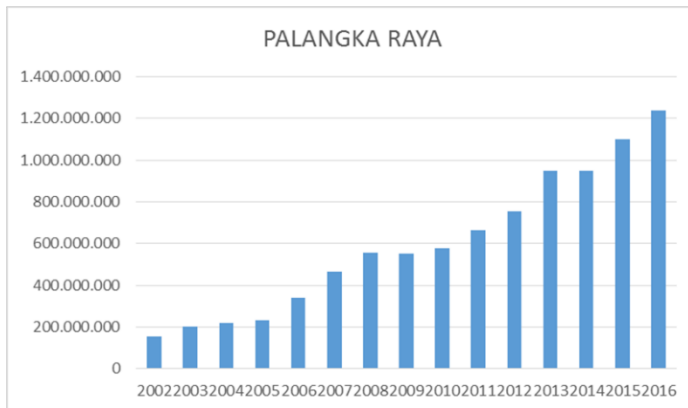
Sedangkan sektor-sektor lain, seperti: sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 10,96%, kemudian sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,40%, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,08%, sektor Jasa Pendidikan sebesar 5,54%, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 4,89%, sektor Real Estate sebesar 3,06%, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,71%, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 2,31%, sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 1,47%, sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,29%, sektor Jasa Lainnya sebesar 1,21%, sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,30%, sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,19%, dan yang paling kecil yaitu sektor Jasa Perusahaan hanya sebesar 0,07%. (Palangka Raya Dalam Angka, 2017).

G. HASIL ANALISIS DESKRIPTIF

a. Pengeluaran Pemerintah Kota Palangka Raya

Sebagai akibat adanya perkembangan kebutuhan masyarakat, maka tuntutan terhadap penyediaan sarana dan prasarana umum semakin meningkat, mengakibatkan anggaran pembangunan setiap tahun mengalami peningkatan.

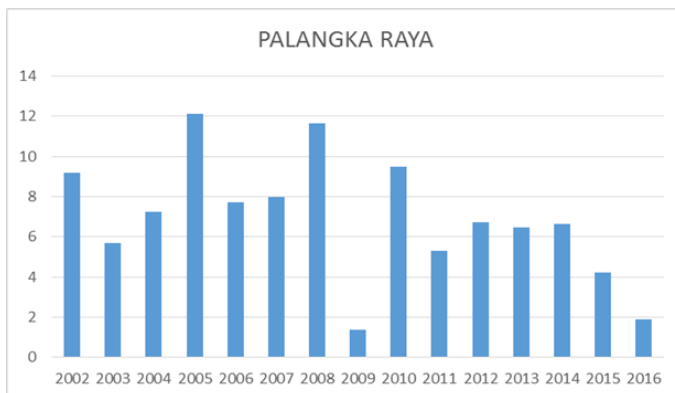
Perkembangan pengeluaran pembangunan daerah oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Anggaran Belanja Pemerintah Berdasarkan Kinerja Tahun Anggaran sejak tahun 2002-2016 disajikan pada gambar 5.6 berikut ini.



Sumber : BPS, Palangka Raya Dalam Angka 2002 – 2016

Dari gambar 5.6 tersebut memperlihatkan bahwa setiap tahun realisasi pengeluaran pembangunan pemerintah Kota Palangka Raya mengalami peningkatan. Pengeluaran pemerintah pada tahun 2002 sebesar Rp 154,336 miliar meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp 1,238 triliun. Jumlah pengeluaran ini tergantung kepada sumber penerimaan daerah dan kebutuhan pembangunan.

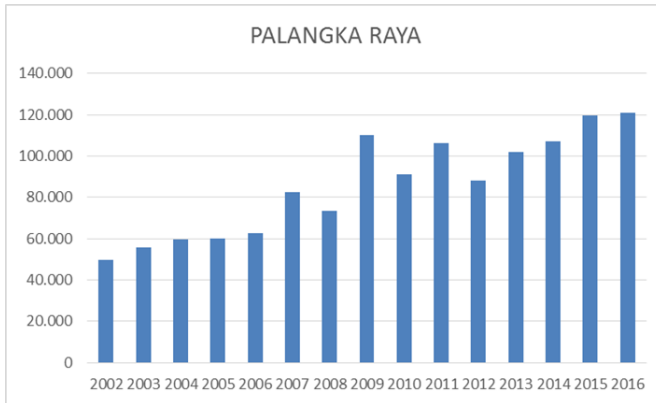
b. Inflasi Kota Palangka Raya



Sumber : BPS, Palangka Raya Dalam Angka 2002 – 2016

Berdasarkan gambar 5.7 dapat dilihat laju inflasi Kota Palangka Raya mengalami peningkatan dan penurunan. Laju inflasi pada tahun 2002 sebesar 9,18 persen menurun pada tahun 2016 menjadi Rp 1,91 persen. Sedangkan rata-rata laju inflasi adalah sebesar 6,90 persen.

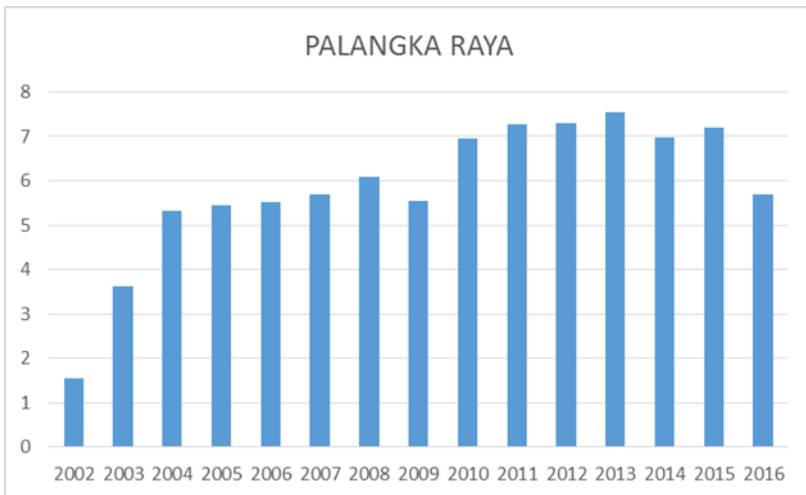
c. Tenaga Kerja Kota Palangka Raya



Sumber : BPS, Palangka Raya Dalam Angka 2002 – 2016

Berdasarkan gambar 5.8 dapat dilihat jumlah penduduk angkatan kerja yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama Kota Palangka Raya mengalami peningkatan dan penurunan. Jumlah penduduk angkatan kerja pada tahun 2002 sebesar 49.908 jiwa meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp 120.785 jiwa.

d. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya



Sumber : BPS, Palangka Raya Dalam Angka 2002 – 2016

Pertumbuhan ekonomi adalah merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan riil Kota Palangka Raya bervariasi setiap tahun dari tahun 2002-2016. Tahun 2002 pertumbuhan sebesar 1,56 persen, sedangkan tahun 2016 sebesar 5,69 persen. Total rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,84 persen

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. MULTIKOLINEARITAS

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Salah satu cara untuk melakukan uji multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factors*). Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas.

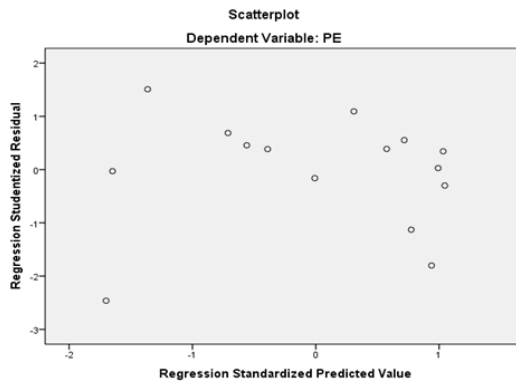
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	0,515	1,942
X2	0,751	1,331
X3	1,000	1,000

Sumber : data diolah

Tabel diatas adalah model regresi yang diajukan untuk variabel independen semuanya terbebas dari multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan data bahwa variabel X1 (Pengeluaran Pemerintah), X2 (Inflasi) dan X3 (Tenaga Kerja) memiliki nilai VIF < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

B. UJI HETEROSKEDASTISITAS



Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola yang teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar 5.10 maka dapat dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas.

C. UJI AUTOKOLERASI

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara residual antar waktu pada model penelitian yang digunakan, sehingga estimasi menjadi bias.

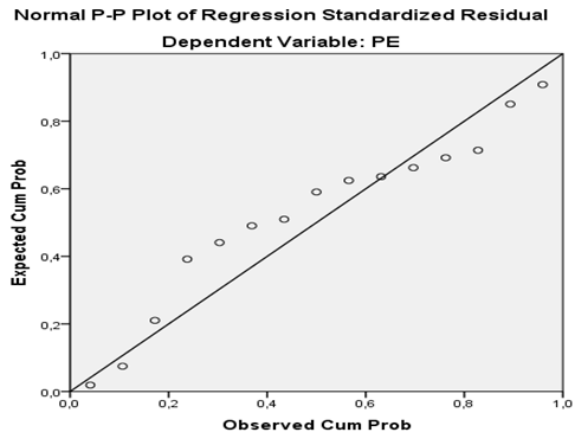
Hasil Uji Autokolerasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,839 ^a	,703	,622	,97517	1,080

Sumber : data diolah

Dari hasil uji autokolerasi didapatkan hasil Durbin-Watson sebesar 1,080 yang berarti dapat dikatakan terbebas dari auto korelasi karena nilai DW berada diantara -2 dan +2.

D. UJI NORMALITAS



Hasil Uji Normalitas

Dari gambar grafik di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal.

E. UJI REGRESI LINEAR BERGANDA DALAM BENTUK DOUBLE LOGARITMA

Uji regresi linear berganda dalam bentuk *double* logaritma untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap *variable* dependen. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi berganda.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Dalam Bentuk Double Logaritma

Variabel	B	Std. error	t	Sig
Konstanta	-36,529	26,003	-1,405	0,188
X1 (Pengeluaran Pemerintah)	5,047	1,257	4,015	0,002
X2 (Inflasi)	0,150	0,098	1,520	0,157

X3 (Tenaga Kerja)	9,040	2,260	4,000	0,002
R ²	0,703	-	-	-
F hit	8,689	-	-	-
DW	1,080	-	-	-

Sumber : data diolah

Hasil analisis yang terdapat pada tabel 5.6 di atas dapat disusun dalam bentuk persamaan regresi linear berganda dalam bentuk persamaan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Log} X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 \text{Log} X_3 + \varepsilon$$

$$Y = -36,529 + 5,047 \text{ Log } X_1 + 0,150 X_2 + 9,040 \text{ Log } X_3$$

$$(26,003) \quad (1,257) \quad (0,098) \quad (2,260)$$

Persamaan regresi di atas, konstanta (β_0) adalah sebesar -36,529 hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel pengeluaran pemerintah (X_1), inflasi (X_2), tenaga kerja (X_3) yang mempengaruhi, maka secara bersama-sama ketiga variabel tersebut pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya sebesar -36,529%. Sedangkan hasil uji regresi linear berganda dalam bentuk log untuk variabel X_1 (Pengeluaran Pemerintah) sebesar 5,047 artinya bahwa apabila terjadi kenaikan sebesar 1% dapat meningkatkan Y (Pertumbuhan Ekonomi) di Kota Palangka Raya sebesar 5,047%. Untuk variabel X_2 (Inflasi) sebesar 0,150 artinya bahwa apabila terjadi kenaikan sebesar 1% dapat meningkatkan Y (Pertumbuhan Ekonomi) di Kota Palangka Raya sebesar 0,150%. Untuk variabel X_3 (Tenaga Kerja) sebesar 9,040 artinya bahwa apabila terjadi kenaikan sebesar 1% dapat menurunkan Y (Pertumbuhan Ekonomi) di Kota Palangka Raya sebesar 9,040%.

F. PENGUJIAN PARSIAL (UJI T)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah ada pengaruh antara pengeluaran pemerintah, inflasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial.

1. Pengujian Parsial untuk variabel X_1 (Pengeluaran Pemerintah)

Berdasarkan hasil pada tabel 5.6 bisa dilihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel X_1 (Pengeluaran Pemerintah) yaitu sebesar 0,002. Karena nilai

signifikansi untuk variabel $X_1 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X_1 (Pengeluaran Pemerintah) terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi)

2. Pengujian Parsial untuk variabel X_2 (Inflasi)

Berdasarkan hasil pada tabel 5.6 bisa dilihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel X_2 (Inflasi) yaitu sebesar 0,157. Karena nilai signifikansi untuk variabel $X_2 > 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X_2 (Inflasi) terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi).

3. Pengujian Parsial untuk variabel X_3 (Tenaga Kerja)

Berdasarkan hasil pada tabel 5.6 bisa dilihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel X_3 (Tenaga Kerja) yaitu sebesar 0,002. Karena nilai signifikansi untuk variabel $X_3 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X_3 (Tenaga Kerja) terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi).

Hasil uji parsial yang telah dilakukan, bahwa dari tiga variabel yaitu variabel Pengeluaran Pemerintah, variabel Inflasi dan variabel Tenaga Kerja hanya dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yaitu variabel Pengeluaran Pemerintah dan variabel Tenaga Kerja.

G. PENGUJIAN SIMULTAN (UJI F)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah ada pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah, inflasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama.

Nilai signifikansi F sebesar 0,003 berdasarkan kriteria pengujian bahwa jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara serempak variabel pengeluaran pemerintah, inflasi dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikan $F = 0,003 < 0,05$. Sehingga jika pengeluaran pemerintah, inflasi dan tenaga kerja bersama-sama meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

H. KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar presentase pengaruh variabel inflasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Nilai R square yang diperoleh sebesar 0,703 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh variabel inflasi dan tenaga kerja sebesar 70,3%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Dengan melihat nilai koefisiensi yang relatif tinggi menunjukkan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang juga relatif tinggi yaitu sebesar 70,3%.

I. PEMBAHASAN

a. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif (nyata) dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang dilakukan semakin baik, maka semakin besar pula pertumbuhan ekonominya. Sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu strategi pengeluaran pemerintah yang baik karena pengeluaran pemerintah merupakan pondasi dalam menentukan keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi. Dumairy (1996) menyebutkan bahwa pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintah sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut berbisnis, melainkan dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum.

b. Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenyataannya adalah inflasi merupakan penyakit ekonomi yang harus dihindari karena inflasi merupakan kenaikan harga yang akan menyebabkan semua harga juga ikut naik. Menurut teori Keynes menjelaskan bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi, menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia

c. Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Tenaga kerja berpengaruh positif (nyata) dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lewis dalam Mulyadi (2003) mengemukakan teorinya mengenai ketenagakerjaan. yaitu kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil

terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja disektor lain. Jumlah tenaga kerja yang besar dapat berarti menambah jumlah tenaga produktif. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja diharapkan akan meningkatkan Produksi, yang berarti akan meningkatkan pula PDRB

BAB
8

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Hasil pengujian parsial (uji t) untuk Variabel X1 (Pengeluaran Pemerintah) yaitu sebesar 4,015 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Karena nilai signifikansi untuk variabel $X1 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X1 (Pengeluaran Pemerintah) terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi).
2. Hasil pengujian parsial (uji t) untuk Variabel X2 (Inflasi) yaitu sebesar 1,520 dengan nilai signifikansi sebesar 0,157. Karena nilai signifikansi untuk variabel $X2 > 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif namun tidak signifikan antara variabel X2 (Inflasi) terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi).
3. Hasil pengujian parsial (uji t) untuk variabel X3 (Tenaga Kerja) yaitu sebesar 4,000 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Karena nilai signifikansi untuk variabel $X3 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X3 (Tenaga Kerja) terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi).

B. IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

- a. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan bermakna, pemerintah harus mampu membuat kebijakan dan dilakukan secara

konsisten untuk meningkatkan kinerja sektor riil dan industri seperti pertanian, kehutanan, serta industri manufaktur dan kebijakan tersebut mengacu pada pemerataan pendapatan.

- b. Walaupun laju inflasi di Kota Palangka Raya masih tergolong rendah, diharapkan pemerintah tetap fokus menjaga stabilitas tingkat inflasi agar tingkat harga tetap normal dan tidak merugikan beberapa pihak.
- c. Pemerintah perlu merangsang terciptanya lapangan pekerjaan baru, seharusnya pemerintah lebih peduli terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) karena pada sektor itulah orang yang menganggur banyak bekerja. UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja apabila dikembangkan dengan baik dan juga didukung oleh pemerintah.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan untuk pihak pemerintah maupun pihak swasta untuk pentingnya melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, inflasi dan tenaga kerja di Kota Palangka Raya untuk saat ini. Dan untuk membenahi pertumbuhan ekonomi di Kota Palangka Raya agar menjadi lebih baik

C. SARAN – SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan lebih matang dalam membuat kebijakan dan tetap memprioritaskan pembangunan sektor berbasis perekonomian di Palangka Raya, sehingga memberikan efek yang lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi.
2. Pemerintah perlu tetap mengatur harga barang agar tetap stabil dan tidak berdampak inflasi akan menjadi tinggi dengan lebih memperhatikan laju tingkat inflasi di Kota Palangka Raya.
3. Diperlukan pembukaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak serta peningkatan pendidikan dan tenaga terampil untuk masyarakat Kota Palangka Raya agar lebih banyak lagi tenaga kerja yang mampu memproduksi barang dan jasa

D. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Peneliti hanya menggunakan tiga variabel independen (Pengeluaran Pemerintah, Inflasi, Tenaga Kerja) dan satu variabel dependen

(Pertumbuhan Ekonomi). Variabel lain diabaikan dan dianggap tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Faktor keterbatasan tenaga dan waktu, penelitian ini hanya meneliti daerah Kota Palangka Raya yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga hasil ini hanya mencerminkan kondisi yang ada di daerah Kota Palangka Raya dan tidak dapat digeneralisasi pada semua keadaan dan semua daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Aziz Septiatin 2016. *Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik, 2002-2016, *Kota Palangka Raya Dalam Angka Tahun*, berbagai tahun penerbitan, BPS Kota Palangka Raya.
- Badan Pusat Statistik. 2002-2016. *Pengeluaran Pemerintah Kota Palangka Raya*. Badan Pusat Statistik, Kota Palangka Raya.
- Badan Pusat Statistik. 2002-2016. *Laju Inflasi Kota Palangka Raya*. Badan Pusat Statistik, Kota Palangka Raya.
- Badan Pusat Statistik. 2002-2016. *Jumlah Angkatan Kerja Kota Palangka Raya*. Badan Pusat Statistik, Kota Palangka Raya.
- Badan Pusat Statistik. 2002-2016. *Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya*. Badan Pusat Statistik, Kota Palangka Raya.
- Boediono, 1999. “*Teori Pertumbuhan Ekonomi*”. Yogyakarta: BPFE.
- Boediono. 2000. “*Ekonomi Internasional*”. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Deddy Rustiono 2008. *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah*.
- Ghozali, Imam. 2001. *Pengantar Statistik Dan Aplikasi SPSS*. Bandung: Salemba empat.
- Gujarati, Damodar. 2004. “*Ekonometrik Dasar*” (terjemahan). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ismail Fahmi Lubis 2014. *Analisis Hubungan Antara Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi*.
- Jhingan, M.L. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Julaihah, Umi dan Insukindro. 2004. *Analisis Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Variabel Makroekonomi di Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol. 7 No. 2, Bank Indonesia: Jakarta.
- Kadarsan, H. W. 1995. *Keuangan Pertanian dan Pembiayaan perusahaan Agribisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. “*Ekonomi Pembangunan*”. Yogyakarta: LPP AMP YKPN.

- Kuncoro, Mudrajat. 2010. *“Dasar – Dasar Ekonomika Pembangunan”*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkoesoebroto, Guritno. (2001). *“Ekonomi Publik”*. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw, N Gregory, 2003. *Macroeconomics*, Fourth Edition, Worth Publisher, Inc., New York.
- Muhammad Firdaus. 2004. *Ekonometrika suatu Pendekatan Aplikatif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mulyadi, 2003, *Sistem Akuntansi*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Nicholson, W, 1994. *“Teori Ekonomi Mikro Prinsip Dasar dan Pengembangannya”*. Rajawali Pers.
- Priyatno, Duwi. 2010. *5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti. (2011). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Cetakan Kelima. Bandung : Alfabeta.
- Rahardja. Prathama. 2004. *Teori ekonomi makro: suatu pengantar*”. Edisi Kedua. Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta.
- Santoso, Singgih. 2001. *SPSS 10: Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Simamora, Marganda dan Sirojuzilam. 2009. *Determinan Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Utara*. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Wahana Hijau Vol. 4 , No. 2, Desember 2009
- Soesastro. 2005. *Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah abad Terakhir*. Kanisius. Yogyakarta
- Sukirno, Sadono. (2000). *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2004). *Makro Ekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryanto 2011. *Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di SUBOSUKA WONOSRATEN Tahun 2004-2008*
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. Edisi Kedua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Todaro, M.P. dan S.C. Smith. (2006). *“Pembangunan Ekonomi Edisi ke Sembilan”*. Jakarta: Erlangga.
- Tommy Prio Haryanto 2012. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*.

Yunan. 2009. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*

CURRICULUM VITAE

Nama : Istighfaris Rezki
Tempat, Tgl Lahir : Palangka Raya, 14 November 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat Sekarang : Jl. Kalibata No. 3 RT 002 RW 013
Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Telephone : 085252903004
Email : farisfaris1411@gmail.com



PENDIDIKAN

FORMAL :

- 2000 – 2006 **MIN 1 KOTA PALANGKA RAYA**
- 2006 – 2009 **MTSN 1 MODEL PALANGKA RAYA**
- 2009 – 2012 **SMA NEGERI 2 PALANGKA RAYA**
- 2012 – 2016 **UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**, Program S1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- 2016 – 2018 **UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**, PROGRAM MAGISTER *Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana*

KEMAMPUAN

- MICROSOFT OFFICE WORD, EXEL, POWER POINT
- TEKNOLOGI INFORMASI, ACCOUNTING PROGRAM
- BAHASA INDONESIA (AKTIF), INGGRIS (PASIF)



Pembangunan ekonomi mutlak diperlukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengembangkan semua bidang kegiatan yang ada di suatu negara. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan yang tinggi merupakan sasaran utama bagi negara berkembang. Pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi agenda pemerintah pusat atau secara nasional, tetapi juga menjadi agenda setiap daerah dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di dalam wilayah tersebut. Untuk itu, kebijakan pembangunan ekonomi dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengelola potensi dan sumber daya yang ada bagi masing-masing daerah.



Penerbit

widina

www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-5811-45-1



9 786235 811451